

ANALISIS FLYPAPER EFFECT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH: EFEK MODERASI UPAYA PAJAK

Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi ¹
Luh Gede Kusuma Dewi ²
I Gd Nandra Hary Wiguna ³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Ganesha

¹ayu.wulan@undiksha.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the flypaper effect phenomenon in Bali Province and its implications for regional fiscal independence. Furthermore, this research also examines the role of local tax efforts in the relationship between the flypaper effect and the regional fiscal independence of the regional government of Bali Province. It is hoped that the results of this research will provide implementation for regional governments in formulating policies that support the realization of fiscal decentralization in regional governments so that they are able to achieve regional financial independence and the effectiveness of PAD as a form of regional government fiscal performance. This research uses secondary data from the APBD of Regency/City Regional Governments throughout Bali Province from 2019–2022, obtained from dpjk.kemenkeu.go.id and bps.go.id. This research uses a multiple regression analysis approach and moderated regression (MRA). The results of this research indicate that the flypaper effect phenomenon occurs in the regional government of Bali province. The flypaper effect phenomenon has been proven to have a negative influence on regional fiscal independence; however, tax efforts are a homologizer moderator of the relationship between the flypaper effect and fiscal independence.

Keywords: Fiscal Independence, Flypaper Effect, Tax Effort

I. PENDAHULUAN

Sebagai daerah pariwisata, Provinsi Bali berpotensi besar untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dapat digali semaksimal mungkin dalam kaitannya dengan otonomi daerah, sehingga mampu mewujudkan kemandirian fiskal. Namun, PAD Provinsi Bali telah menurun sejak 2019. Di tengah pandemi COVID-19, kemandirian fiskal pada kondisi ini seharusnya menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai. Namun demikian, pada tahun 2020 hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat 2020 menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Bali masih termasuk ke dalam status IKF 3 (mandiri), yaitu Kabupaten Badung (0,5420) dan Provinsi Bali (0,5367), sedangkan Kabupaten

Gianyar (0,2634) dan Kota Denpasar (0,3723) termasuk ke dalam status IKF 2 (menuju mandiri).

Di tengah pandemi COVID-19, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung berhasil meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerahnya menjadi 0,1498 dan 0,1999, dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, status mandiri provinsi Bali tidak serta merta menandakan bahwa PAD-nya telah digunakan sepenuhnya. Dengan IKF sebesar 0,5420, Kabupaten Badung belum dapat membiayai sebagian besar belanja pemerintah daerah dengan PAD-nya, berdasarkan penilaian kualitas desentralisasi fiskal Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2020.

Pemerintah daerah pasti membutuhkan banyak pendanaan untuk menjalankan kegiatan operasinya, sehingga pemerintah pusat akan memberikan dana perimbangan untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat digunakan untuk menterjemahkan kondisi keuangan yang merata pada semua daerah. Pada kenyataannya, pemerintahan daerah memanfaatkan transfer perimbangan pusat guna membiayai belanja daerah sebagai pendanaannya yang utama (Suryani, 2018). Fenomena ini menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai *flypaper effect*, di mana hibah atau transfer pemerintah pusat lebih bermanfaat untuk mendanai belanja pemerintah daerah dibandingkan mengutamakan penggunaan PAD-nya (Dick-Sagoe & Tingum, 2021). Berikut ini disajikan proporsi pendapatan daerah di Provinsi Bali dalam kurun waktu 2018-2022.

Tabel 1
Proporsi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Pendapatan Daerah
2018	3.718,50 M	2.535,48 M	6.253,37 M
2019	4.023,16 M	2.616,50 M	6.645,54 M
2020	3.069,47 M	2.643,16 M	5.718,34 M
2021	3.117,07 M	2.801,19 M	5.923,15 M
2022	3.862,88 M	2.017,66 M	5.885,46 M

Sumber: dpjk.kemenkeu.go.id, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa PAD mempunyai persentase yang lebih besar dibandingkan dengan dana perimbangan yang dimiliki setiap daerah di Bali pada tahun 2018–2022. Namun, kondisi ini tidak berarti bahwa kondisi *flypaper effect* tidak mungkin terjadi pada wilayah tersebut. Ini karena, menurut penelitian Kusumadewi & Rahman (2007), fenomena *flypaper effect* dapat pula terjadi pada

daerah dengan PAD yang tinggi dan rendah. Selain itu, kebijakan belanja tahun berjalan pemerintah daerah lebih banyak dipengaruhi oleh dana transfer khususnya DAU dengan jumlah paling tinggi yang didapatkan di periode sebelumnya dibandingkan PAD, meskipun PAD dan pendapatan transfer diperoleh pada tahun yang sama, tetapi pengaruh pendapatan transfer terhadap belanja daerah lebih besar.

Banyak literatur di dalam dan di luar negeri telah menyelidiki fenomena *flypaper effect* dalam konteks kebijakan belanja pemerintah. Studi empiris di Turki menemukan bahwa *flypaper effect* memang terjadi pada kota-kota di Turki, kota-kota di Turki juga mengalami efek substitusi dari hibah tanpa syarat terhadap upaya pengumpulan pendapatan (Acar, 2019). Selain itu, kondisi serupa di Polandia menemukan bahwa *flypaper effect* juga ada pada pemerintah Polandia yang berarti bahwa pendapatan eksternal memberikan kontribusi terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan lokalnya, dalam hal ini transfer antar pemerintah (hibah umum, hibah khusus, dan bagi hasil pendapatan pajak penghasilan badan) sebagai penyebab utamanya (Guziejewska, et al. 2021). Di Indonesia, Abdullah & Riani (2020), dan Pangesti & Faridatussalam (2022) menemukan *flypaper effect* juga terjadi di pemerintah kota/kabupaten khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang memberikan dampak pada penurunan kinerja keuangan yang digambarkan dengan rasio desentralisasi fiskal. Dengan adanya kondisi *flypaper effect*, PAD tidak tergal dengan maksimal karena lebih memaksimalkan pendapatan transfer sehingga rasio desentralisasi fiskal menjadi rendah.

Namun, temuan penelitian lain berbeda. Kabupaten dan kota di Indonesia tidak mengalami *flypaper effect* yakni kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Octaviana (2021) kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur (Rianti & Kurnia, 2020), dan kabupaten/kota di Provinsi Aceh (Chadiza & Syahnur, 2022). Studi tersebut menemukan bahwa dibandingkan pendapatan transfer, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar pada belanja daerah. Selanjutnya, penelitian terkait topik ini hanya melihat ada atau tidaknya fenomena *flypaper effect* dan bagaimana kondisi itu berdampak pada kinerja keuangan masih sedikit yang mengkaji. Salah satu penelitian terbaru yang dilakukan oleh Fadhli et al. (2023) melihat bagaimana upaya pajak mempengaruhi *flypaper effect* dan tekanan fiskal pada kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Aceh.

Dengan demikian, maka penelitian kali ini mereplikasi penelitian yang dilakukan (Fadhli et al., 2023) dengan mengembangkan pada lingkup pemerintahan yang berbeda yakni kabupaten/kota di Provinsi Bali sebagai satu-satunya daerah yang memperoleh status indeks kemandirian fiskal sangat mandiri (IKF 1) secara berurut-urut dari tahun 2013-2019. Selain itu, penelitian ini ingin memfokuskan pada kebijakan belanja daerah pada kondisi pra, era, dan pasca krisis pandemi covid-19 untuk menemukan fenomena *flypaper effect* pada kondisi krisis (pandemic covid-19) dan non krisis. Covid-19 menyebabkan keterbatasan anggaran pada fiskal pemerintah daerah yang mana terdapat peningkatan belanja pemerintah daerah seiring dengan upaya tersebut untuk mengatasi dampak Covid-19, sedangkan alokasi pendapatan transfer yang dialokasikan pemerintah pusat turut mengalami penurunan seiring dengan rasionalisasi pengeluaran pemerintah (Ulya, 2020). Pandemi COVID-19 memburukkan ekonomi, terlebih pendapatan asli daerah karena fenomena ini merupakan kondisi yang luar biasa, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pusat mempengaruhi belanja daerah sebelum, selama, dan setelah peristiwa tak terduga pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian fiskal sebagai indikator kinerja keuangan. Rasio ini berkaitan erat dengan fenomena *flypaper effect* yang menunjukkan kondisi respon terhadap belanja lebih tinggi menggunakan dana transfer, sehingga upaya pemerintah dalam menggali PAD tidak maksimal terlebih lagi pada kondisi pandemi covid-19. Pada negara berkembang, pengalokasian pendapatan transfer lebih berfokus pada belanja daerah dan kurang mempertimbangkan kemampuan untuk mengumpulkan pajak lokal. Dengan adanya transfer yang semakin besar akan memberikan pengaruh negatif terhadap pengumpulan pendapatan asli daerah (Kuncoro, 2007).

Selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan peran upaya pajak (*tax effort*). *Tax effort* yang mencapai presentase 76%-100% ada pada kategori tinggi, presentase 51%-75% ada pada kategori sedang, presentase 26%-50% ada pada kategori rendah, dan presentase 0%-25% ada pada kategori sangat rendah (Asmawanti et al., 2016a). Nilai yang lebih besar menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak. Semakin tingginya kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak akan memengaruhi tingkat

kemandirian fiskal daerah yang merupakan indikator dari ukuran kinerja keuangan daerah.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji apakah terdapat kondisi *flypaper effect* pada pemerintah daerah di Provinsi Bali pada tahun 2019-2022, selanjutnya mengkaji bagaimana pengaruh *flypaper effect* terhadap kemandirian fiskal daerah dan yang terakhir mengkaji peran upaya pajak pada pengaruh *flypaper effect* terhadap kemandirian fiskal daerah Provinsi Bali. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan implementasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung perwujudan desentralisasi fiskal pada pemerintah daerah sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagai salah satu bentuk kinerja fiskal pemerintah daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Menurut Ismail et al. (2016) teori keagenan ialah pendekatan kontrak yang sesuai untuk mengatur kepentingan agen dan prinsipal dalam kasus konflik kepentingan. Implikasi dari adanya pendelegasian pekerjaan antara satu pihak kepada pihak lainnya menimbulkan hubungan kontraktual antara kedua belah pihak. Teori agensi digunakan pada penelitian ini untuk menjelaskan hubungan diantara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah daerah memiliki otoritas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan memberikan pendapatan transfer kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada mereka untuk membantu mereka menjalankan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab atas dana perimbangan ini kepada pemerintah pusat (prinsipal).

2.2. Hubungan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Salah satu jenis dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan guna mewujudkan keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah adalah dana alokasi umum, yangmana digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah pada era desentralisasi. DAU dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah berdasarkan prioritas dan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan umum Fadilah & Helmayunita (2020). Berdasarkan hasil penelitian Kuntadi et al. (2022), Pratiwi (2019), Waskito et al. (2019), Yuliantoni & Arza (2021), dan Jayanti (2020) menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara variabel belanja

modal serta dana alokasi umum. Namun, penelitian Nurma & Asyik (2023) menemukan bahwa dana alokasi umum tidak mempengaruhi belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah digunakan sebagai dasar dalam menyusun APBD. Ini berarti bahwa pemerintah daerah mengatur anggaran belanja modal berdasarkan dengan kebutuhan daerah dan pertimbangan pendapatan asli daerah yang diterima. Terdapat beberapa sumber penerimaan dari Pendapatan asli daerah yakni pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Penelitian oleh Priambudi (2017), Pratiwi (2019), Jayanti (2020), Nurma & Asyik (2023) menemukan bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengaruh yang positif pada belanja modal. Namun, Waskito et al. (2019) dan Yuliantoni & Arza (2021) tidak menemukan hubungan antara keduanya. Berdasarkan pemaparan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4. Fenomena *Flypaper Effect*

Menurut Tasri (2018), *Flypaper Effect* adalah situasi di mana suatu daerah melakukan pengeluaran lebih besar dengan menggunakan dana transfer daripada pendapatan asli daerah-nya sendiri. Terjadinya kondisi *Flypaper effect* ketika: 1) terdapat Pengaruh atau nilai koefisien dana transfer yang lebih besar terhadap Belanja Modal dibandingkan nilai koefisien PAD, dan keduanya signifikan, 2) tidak signifikannya pengaruh atau respon PAD pada Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar & Setiawati (2018) dan Paramartha & Budiasih (2016) menemukan bahwa DAU memberikan kontribusi pengaruh yang lebih besar pada Belanja Modal dibandingkan PAD sehingga dinyatakan terjadi *flypaper effect*. Selanjutnya Nurlaela Wati et al. (2022) menemukan adanya fenomena *flypaper effect* di negara-negara berkembang yang menerapkan sistem presidensial (republik) dan memberikan bukti empiris yang substansial terhadap kebijakan belanja pemerintah pada saat krisis dan non-krisis (Covid-19). Akan tetapi, Putra & Dwirandra (2015) dan Ningsih (2020) tidak berhasil menemukan adanya peristiwa *flypaper effect* pada

belanja daerah Kabupaten maupun Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Terjadi *flypaper effect* pada pemerintah daerah Provinsi Bali tahun 2019-2022

2.5. Pengaruh *Flypaper Effect* terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Kondisi di mana daerah lebih cenderung menggunakan transfer pusat ke daerah daripada menggunakan pendapatan asli daerah untuk mengatur pembelanjaan atau alokasi dana, dikenal sebagai *flypaper effect*. Jika belanja daerah yang dilakukan terfokus dalam pemaksimalan pajak dan retribusi maka peningkatan PAD akan terdorong, namun jika belanja daerah yang dilakukan karena terdapat peningkatan pada dana transfer maka PAD yang dihasilkan tidak akan maksimal. Kesulitan dalam pengumpulan pajak dan mengurangi pengeluaran mengakibatkan pemerintah bergantung pada pendanaan dari luar, yang menyebabkan kinerja keuangan yang buruk. (Gomes, Alfinito, dan Albuquerque dalam Dewi & Wiguna (2019). Abdulah dan Riani (2020); Ikhwani dan Ratna (2020); dan Yudhistira dan Zulfikar (2022) menunjukkan bahwa *flypaper effect* memberikan pengaruh negatif signifikan pada kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: *Flypaper effect* berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal daerah

2.6. Peran *Tax Effort* pada hubungan antara *Flypaper Effect* dan Kemandirian Fiskal Daerah

Tax Effort menunjukkan hubungan antara kemampuan daerah untuk membayar pajak dan hasil sistem pajak Asmawanti et al. (2016). Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah untuk membayar pajak, produk domestik regional bruto biasanya digunakan. Yunanto (2010) menyatakan bahwa kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dapat ditingkatkan ketika PDRB suatu negara meningkat dan sebaliknya. Menurut studi Oktavia & Handayani (2021), Rumapea & Siringoringo (2020), dan Rahmayani (2018), upaya pajak berdampak positif pada kinerja keuangan daerah. Dengan upaya pajak yang optimal, penerimaan daerah meningkat melalui pajak daerah yang berdampak pada perolehan PAD semakin besar sehingga meningkat pula kemandirian daerah tersebut. Ini berarti bahwa daerah tidak terlalu mengandalkan pemerintah pusat

dalam hal anggaran. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Tax effort memoderasi hubungan antara *flypaper effect* dan kemandirian fiskal daerah

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini melibatkan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota Bali dari tahun 2019 hingga 2022. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengumpulkan sampel. Berikut ini adalah dua kriteria yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Terdapat data keuangan APBD provinsi, kabupaten, atau kota pada situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> serta data PRBD pada situs resmi Badan Pusat Statistik.
- b. Laporan Realisasi Anggaran telah dipublikasikan secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2022.

Penelitian ini menggunakan dua bentuk model penelitian. Pada analisis data untuk Model 1 menggunakan pendekatan analisis regresi berganda yakni untuk melihat pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal serta terjadinya *flypaper effect*, selanjutnya untuk model 2 menggunakan analisis regresi moderasi (MRA) untuk menganalisis peran upaya pajak pada hubungan antara kondisi *flypaper effect* dan kemandirian fiskal daerah.

A. Model 1 (Analisis Regresi Linier Berganda)

$$BM = a + b_1DAU + b_2PAD + e$$

Model 1 dibentuk untuk mengetahui pengaruh DAU dan PAD terhadap BM, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel bebas (DAU dan PAD) secara parsial terhadap variabel terikat BM dan untuk mendekteksi terjadinya *flypaper effect* melalui nilai koefisien masing-masing variabel bebas.

B. Model 2 (*Moderation Regression Analysis*)

Model 2 menggunakan 3 model regresi, yakni (1) dengan memasukkan variabel independen utama dalam persamaan regresi, (2) dengan memasukkan variabel independen utama dan pemoderasi dalam satu persamaan dan kemudian (3) menambahkan variabel independen baru

berupa interaksi kedua variabel independen. Model persamaan atas pengujian analisis regresi moderasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Persamaan 1: } KF = a + b_1FE + e$$

$$\text{Persamaan 2: } KF = a + b_1FE + b_2LTE + e$$

$$\text{Persamaan 3: } KF = a + b_1FE + b_2LTE + b_3FE \times LTE + e$$

Model 2 dibentuk bertujuan mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas seperti FE, LTE dan variabel interaksi (FE*LTE) terhadap variabel KF. Model 2 dilakukan secara bertahap menggunakan persamaan *moderation regression analysis* (MRA), dimana regresi dilakukan pada variabel utama + moderasi + interaksi.

Berikut ini penjelasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Belanja Modal	Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin	Nilai realisasi Belanja Modal	Rasio (Rp)
Dana Alokasi Umum	Dana yang berasal dari alokasi pendapatan APBN ke daerah guna untuk pemerataan keuangan daerah	Nilai realisasi DAU	Rasio (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah yang bersumber dari pajak maupun non-pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Nilai realisasi PAD	Rasio (Rp)
<i>Flypaper Effect</i>	Kondisi daerah yang merespon lebih besar pengeluarannya menggunakan dana perimbangan dari pada pendapatan asli daerah yang diukur dengan rasio ketergantungan keuangan melalui perbandingan antara realisasi dana perimbangan dengan total pendapatan daerah dari sumber lain selain Dana Perimbangan	Realisasi DP/ Realisasi TPD	Rasio (%)
<i>Local Tax Effort</i>	Pengumpulan pajak daerah yang diukur dengan rasio <i>tax effort</i> melalui perbandingan realisasi pajak daerah dengan PDRB sebagai kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah	Realisasi PD/PDRB	Rasio (%)
Kemandirian Fiskal	Capaian atau hasil kinerja dilingkup keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah melalui perbandingan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat	Realisasi PAD/DP	Rasio (%)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan realisasi anggaran tahun 2019–2022 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan data PRDB yang ditelusuri melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik. Hasil pengujian statistik deskriptif dari penelitian ini disajikan berikut ini.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata-Rata	Standar Deviasi
Dana Alokasi Umum	40	11.52	12.12	11.8150	.14920
Pendapatan Asli Daerah	40	11.02	12.68	11.6982	.47203
Belanja Modal	40	10.76	12.16	11.3118	.31842
<i>Flypaper Effect</i>	40	13.31	814.48	199.9381	160.26395
Upaya Pajak	40	.26	26.04	1.7270	4.13809
Kemandirian Fiskal	40	10.31	96.22	33.8137	22.62734

Sumber: Data Sekunder diolah melalui SPSS, 2023

Nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* untuk Model 1 adalah 0,200, dan untuk Model 2 adalah 0,193, yang berarti lebih dari 0,05, menurut hasil uji menggunakan Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi variable penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Model 1	Model 2
N		40	40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	.0000000
	Std. Deviation	24.47113963	19.92252277
	Most Extreme Differences		
	Absolute	.086	.116
	Positive	.081	.116
	Negative	-.086	-.113
Test Statistic		.086	.116
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.193 ^c

Sumber: Data Sekunder diolah melalui SPSS, 2023

Uji Heterokedastisitas menggunakan uji *glejzer* menunjukkan hasil bahwa setiap variabel mempunyai tingkat signifikansi 0,343 (PAD) dan 0,107 (DAU) > 0,05, sehingga model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Karena semua

variabel memenuhi syarat bebas multikolinieritas, yaitu nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam persamaan regresi.

Tabel 5
Collinearity Statistic

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LG10PAD	.976	1.024
	LG10DAU	.976	1.024
2	Flypaper Effect	.935	1.069
	Tax Effort	.935	1.069

Sumber: Data Sekunder diolah melalui SPSS, 2023

Nilai DW pada pengujian model 1 berada di antara $dU < DW < 4-dU$ ($1,600 < 2,272 < 2,400$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterima. Pada pengujian model 2, nilai DW juga berada di antara $dU < DW < 4-dU$ ($1,544 < 1,601 < 2,456$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi antar data berdasarkan urutan waktu.

Tabel 6
Uji Regresi Linier Berganda Model 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.507	2.788		-.182	.857
	LG10PAD	.446	.075	.661	5.987	.000
	LG10DAU	.559	.236	.262	2.369	.023

Sumber: Data Sekunder diolah melalui SPSS, 2023

Berikut susunan persamaan regresi berdasarkan perolehan data analisis regresi linier yang ditunjukkan pada Tabel 6:

$$BM = -0,507 + 0,559 \text{ DAU} + 0,446 \text{ PAD}$$

Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal (BM)

Perolehan uji statistik didapatkan nilai signifikansi DAU sebesar $0,023 < 0,05$ dengan nilai t-statistik (2,369) sehingga hasil uji signifikan (berpengaruh). Nilai koefisien sebesar 0,559 menunjukkan korelasi positif antara DAU dan belanja modal. Hal tersebut dapat didefinisikan bahwasanya dengan asumsi DAU bertambah maka penggunaan modal juga akan bertambah. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum

memberikan pengaruh yang positif signifikan pada belanja modal terdukung. Hasil ini memperkuat temuan penelitian dari Kuntadi et al. (2022), Pratiwi (2019), Waskito et al. (2019), Yuliantoni & Arza (2021), dan Jayanti (2020) yang membuktikan adanya pengaruh positif signifikan antara DAU dan belanja modal, dimana semakin meningkat perolehan DAU berimplikasi pada semakin tingginya belanja modal pemerintah daerah. Dalam upaya mengurangi kesenjangan fiskal dan mewujudkan pemerataan antar daerah, maka pemerintah pusat memberikan dana transfer kepada daerah salah satunya dalam contoh pendanaannya melalui Dana Alokasi Umum.

Karena Dana Alokasi Umum memiliki sifat *block grant*, pemerintah daerah dapat memanfaatkan DAU berdasarkan prioritas kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Fadilah & Helmayunita (2020). Dana Alokasi Umum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, adalah salah satu bentuk penerimaan dari APBN yang didistribusikan secara adil ke seluruh daerah untuk memenuhi kebutuhan keuangan khusus mereka sebagai bagian dari upaya untuk mendesentralisasikan pemerintahan sehingga DAU ini didistribusikan sesuai dengan alokasi dasar dan kekurangan fiskal. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bertambahnya nilai DAU memengaruhi pengalokasian belanja modal daerah, Oleh karenanya, pemerintah daerah masih membutuhkan DAU untuk kegiatan belanja modal sampai saat ini dalam menjalankan otonomi daerah untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

Pengujian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil uji statistik didapatkan nilai signifikansi PAD sebesar $0,000 > 0,05$ dengan nilai *t* hitung (5,987) sehingga hasil uji signifikan (berpengaruh). Nilai koefisien sebesar 0,446 menunjukkan korelasi positif antara PAD dan belanja modal. Hal tersebut dapat didefinisikan bahwasanya dengan asumsi PAD bertambah maka penggunaan modal juga akan bertambah. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal terdukung. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Priambudi (2017), Pratiwi (2019), Jayanti (2020), Nurma & Asyik (2023) yang menemukan bahwa variabel belanja modal dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. PAD adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang diperuntukkan guna menanggung sebagian biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Dengan kata lain, PAD berdampak positif, karena anggaran belanja

modal yang dialokasikan lebih besar jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah lebih tinggi. Karena pendapatan ini memengaruhi proporsi belanja modal, maka besaran anggaran belanja modal akan disesuaikan berdasarkan pada kebutuhan daerah maupun pertimbangan perolehan pendapatan Nurma & Asyik (2023). Dengan demikian, dalam penentuan alokasi belanja modal, besaran pendapatan asli daerah juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengalokasian belanja.

Pengujian Terjadinya *Flypaper Effect*

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan pada tabel 6, hasilnya menunjukkan bahwa koefisien yang dimiliki PAD (0,446) lebih rendah dibanding dengan DAU (0,559). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh *flypaper* terhadap Konsumsi Modal Umum/Aturan/Kota di seluruh Bali 2019-2022 yang ditimbulkan oleh DAU. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan dana perimbangan (DAU) memiliki pengaruh lebih besar terhadap Belanja Modal dibandingkan Pendapatan Asli Daerah terdukung.

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel PAD memberikan pengaruh yang signifikan pada belanja modal. Namun, koefisien yang dimiliki PAD (0,446) lebih rendah dibanding dengan DAU (0,559). Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi *flypaper effect* pada Belanja Modal provinsi/kabupaten/kota di Bali pada tahun 2019-2022 dimana DAU sebagai faktor penyebabnya. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramartha & Budiasih (2016) dan Azhar & Setiawati (2018). Hal ini menunjukkan bahwa DAU yang diperoleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota se-Bali pada tahun 2019-2022 lebih mampu mendorong pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal dibanding menggunakan PAD-nya sendiri. Adanya transfer dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah sangat reaktif, seperti yang ditunjukkan oleh kondisi ini. Dengan kata lain, *flypaper effect* menunjukkan bahwa peningkatan alokasi transfer akan diikuti oleh peningkatan belanja yang memperkuat ketergantungan pada pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerah Heryanti et al. (2019).

Hasil penelitian ini mendukung temuan Azhar & Setiawati (2018), dan Paramartha & Budiasih (2016) bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Modal sehingga dinyatakan terjadi fenomena *flypaper effect*. Pada masa pandemi covid 19, optimalisasi PAD sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah di masa pandemi terbatas, sehingga

ketergantungan pemerintah daerah dengan dana transfer semakin meningkat ditunjukkan pada rasio kemandirian finansial rata-ratanya mencapai 33,81%. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Nurlaela Wati et al. (2022) yang menemukan bahwa *flypaper effect* pada DAU berpengaruh positif pada belanja daerah dan nilainya meningkat selama pandemi. Hasil tersebut membuktikan adanya fenomena *flypaper effect* dan kondisi ini terjadi sebelum dan pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 7
Hasil Pengujian Moderation Regression Analysis Model 2

	Persamaan I			Persamaan II			Persamaan III		
	B	t-statistik	Sig.	B	t-statistik	Sig.	B	t-statistik	Sig.
<i>Fly paper Effect</i> (FE)	-.049	-2.305	.027	-.042	-1.913	.063	-.001	-.021	.983
<i>Tax Effort</i> (TE)				1.131	1.330	.192	5.841	2.018	.051
FE*TE							-.071	-1.699	.098

Sumber: Data Sekunder diolah melalui SPSS, 2023

Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil uji statistik pada pengujian model 2, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi *flypaper effect* sebesar $0,027 > 0,05$ dengan *t* hitung (-0,2305) sehingga hasil uji signifikan, dengan nilai koefisien *flypaper effect* sebesar -0,049, artinya *flypaper effect* memiliki hubungan yang negatif. Hal ini menjelaskan bahwa penurunan yang terjadi pada *flypaper effect* dapat mempengaruhi kemandirian fiskal. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa hipotesis empat yang menyebutkan bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal terdukung. Hal ini dapat diartikan bahwa penurunan yang terjadi pada *flypaper effect* dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan dalam hal ini kemandirian fiskal atau sebaliknya semakin tinggi kondisi *flypaper effect* maka tingkat kemandirian fiskal daerah akan semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Riani (2020) dan Yudhistira & Zulfikar (2022).

Berdasarkan hasil pengujian moderasi, didapatkan hasil signifikansi *tax effort* terhadap kemandirian fiskal sebesar $0,051 > 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar 2.018 dan hasil signifikansi interaksi *tax effort* dan *flypaper effect* sebesar $0,098 > 0,05$ dengan nilai *t-statistic* sebesar -1.699. Hasil pengujian moderasi ini menunjukkan bahwa *tax effort* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian fiskal, selain itu interaksi antara *flypaper effect* dengan *tax*

effort juga menunjukkan hasil tidak signifikan pada kemandirian fiskal, maka dapat diartikan pada kondisi ini terjadi moderasi potensial (*homologizer moderator*). Dalam hal ini, *variable* upaya pajak hanya potensial menjadi *variable* pemoderasi tidak menjadi *variable* moderasi semu ataupun *variable* moderasi murni. Secara teoritis, dengan adanya upaya pajak yang kuat, pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan penerimaannya dan daerah dapat menjadi lebih mandiri tidak lagi bergantung dengan eksternal, yang selanjutnya kinerja keuangan daerah akan semakin baik Fadhli et al. (2023). Akan tetapi pada penelitian ditemukan bahwa nilai *tax effort* tergolong kategori rendah yakni rata-ratanya hanya mencapai 1,727%. Tekanan fiskal dapat terjadi karena upaya pajak yang masih sangat rendah. Ini berarti bahwa daerah harus mengoptimalkan potensi dan kemampuan pajak mereka untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap pusat Asmawanti et al. (2016).

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Menurut analisis yang dilakukan, pengalokasian belanja modal dapat dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan fenomena *flypaper effect* terjadi di Pemerintah Daerah Provinsi Bali tahun 2019-2022 dan kondisi ini memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah khususnya kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini, adanya fenomena *flypaper effect* dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menimbulkan penurunan kemandirian daerah karena cenderung lebih memanfaatkan pendapatan transfer dalam hal ini Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah yang mana hal ini dapat meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pusat. Berdasarkan hasil pengujian moderasi dapat disimpulkan bahwa *tax effort* hanya sebagai *variable* moderasi potensial (*homozes moderator*). Temuan penelitian ini dapat berguna dalam mereformasi kebijakan terkait pendanaan transfer kepada pemerintah daerah.

Meskipun penelitian ini dilakukan sebaik mungkin, namun peneliti menyadari bahwa ada beberapa keterbatasan, yaitu (1) Penelitian ini menggunakan lingkup penelitian hanya pada salah satu jenis dana transfer yakni Dana Alokasi Umum, (2) ruang lingkup penelitian hanya pada pemerintah daerah provinsi Bali. Peneliti mengusulkan beberapa saran untuk penelitian lanjutan berdasarkan keterbatasan penelitian ini, diantaranya : (1) Memperluas ruang lingkup penelitian

misalkan menggunakan ketiga jenis dana transfer untuk melihat besar pengaruh keseluruhan pendapatan transfer, (2) memperluas lingkup penelitian pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan (3) Menambah variabel lain yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang fenomena *flypaper effect*, serta variabel yang dapat memoderasi hubungan antara *flypaper effect* dan kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Riani, L. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4).
- Acar, Y. (2019). Does Flypaper Effect Exist? New Evidence from Turkish Municipalities. *Sosyoekonomi*, 27.
- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi, B. (2016a). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35–52.
- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi, B. (2016b). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35–52.
- Azhar, M. R., & Setiawati, E. (2018). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chadiza, N., & Syahnur, S. (2022). Flypaper Effect Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 35–44.
- Dewi, N. A. W. T., & Wiguna, I. G. N. H. (2019). Evaluasi Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 201–222.
- Dick-Sageo, C., & Tingum, E. N. (2021). Flypaper effect of intergovernmental transfers and incentives to improve own-source revenue mobilization of local governments in the central region of Ghana. *Open Journal of Social Sciences*, 9(8), 434–447.
- Fadhli, F., Asnawi, A., & Jummaini, J. (2023). Peran Tax Effort Pada Pengaruh Flypaper Effect Dan Fiscal Stress Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 7(2), 143–155.

- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159.
- Guziejewska, B., Majdzińska, A., & Żóltaszek, A. (2021). The Flypaper Effect and Desirable Legislative Changes to Local Government Financing Systems. *Lex Localis-Journal of Local Self-Government*, 19(3).
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(8).
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan Kabupaten di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 8, 1–29.
- Kuntadi, C., Pamungkas, A., Fitriyanti, D. D., & Astri, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 278–289.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(1).
- Ningsih, P. (2020). *Analisis Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. STIE YKPN.
- Nurlaela Wati, L., Ispriyahadi, H., & Habibi Zakaria, D. (2022). The flypaper effect phenomenon of intergovernmental transfers during the Covid-19: Evidence from Indonesia. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci: Časopis Za Ekonomsku Teoriju i Praksu*, 40(2), 353–373.
- Nurma, A. N. A., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(8).
- Octaviana, V. (2021). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol*, 22(4).

- Oktavia, C., & Handayani, N. (2021). Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).
- Pangesti, M. D., & Faridatussalam, S. R. (2022). *Analisis Flypaper Effect Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020*. Universitas Muhammadiyah.
- Paramartha, M. F., & Budiasih, I. (2016). Analisis Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(2), 1536–1564.
- Pratiwi, N. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(2), 105–120.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di pulau jawa tahun 2013. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 136–147.
- Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. (2015). Dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 811–827.
- Rahmayani, M. W. (2018). Analisis Tentang Kemandirian Pembangunan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013). *MAKSI*, 5(1).
- Rianti, I. D. A., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Rumapea, M., & Siringoringo, G. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 150–164.
- Suryani, A. I. (2018). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Periode 2011-2013). *Journal of Accounting Science*, 2(2), 165–179.
- Tasri, A. (2018). The flypaper effect phenomenon: Evidence from Indonesia. *European Journal of Engineering and Formal Sciences*, 2(1), 20–24.
- Ulya, H. N. (2020). Alternatif strategi penanganan dampak ekonomi covid-19 pemerintah daerah Jawa Timur pada kawasan agropolitan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 80–109.
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Ruserlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.

-
- Yudhistira Aryadi, M., & Zulfikar, M. S. (2022). *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Serta Dampak Flypaper Effect Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yuliantoni, S., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 170–187.
- Yunanto, L. (2010). *Analisis potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak hotel di Kabupaten Klaten*. Sebelas Maret University.